

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama pendapatan Negara adalah penerimaan pajak. Pendapatan negara yang besar akan mempengaruhi kemakmuran masyarakatnya, hal ini karena pendapatan negara di alokasikan untuk kepentingan, namun satu sisi perusahaan sebagai wajib pajak, menganggap bahwa pajak masyarakat. Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih terdapat problem masalah di instansi yang mengelolah pajak. Problem masalah yang riil yaitu adanya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian negara membutuhkan penerimaan pajak yang maksimal untuk terus mengelola pemerintahan dan berusaha memakmurkan masyarakat merupakan suatu beban. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada negara, walaupun hal ini membuat perusahaan berusaha untuk menghindarinya dengan cara-cara yang legal. Cara-cara ini dilakukan secara legal dengan mencari setitik celah yang ada pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Praktik ini memang legal, namun di mata negara, hal ini tentu merugikan karena mengurangi porsi pendapatan negara.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak, di satu sisi,

pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari semua wajib pajak, sedangkan di sisi lainnya, semua wajib pajak khususnya perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak tersebut menyebabkan banyak perusahaan merasa keberatan untuk membayar beban pajak, sehingga mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Manajemen melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). *Tax Avoidance* adalah cara legal untuk mengurangi hutang pajak, dampak yang bisa terjadi dari usaha ini yaitu reputasi perusahaan yang buruk dimata publik dan denda, sedangkan *Tax Evasion* adalah cara *illegal* untuk mengurangi hutang pajak, hal ini karena penggelapan pajak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Sinaga & Sukartha, 2018).

Tax avoidance disebutkan tidak melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak melakukannya dengan berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perpajakan (Pohan dalam Nugraha & Mulyani, 2019). *Tax avoidance* merupakan hal yang rumit karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan (legal), namun disisi lain *tax avoidance* tidak di inginkan pemerintah karena dapat berpengaruh menurunkan pendapatan negara.

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai *tax avoidance* dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) yang tergolong rendah. *Tax ratio* dapat digunakan untuk mengukur kinerja otoritas pajak. Tahun 2019, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* merilis *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019* yang kemudian menempatkan *tax ratio* Indonesia di posisi paling rendah. Dalam laporan OECD dengan basis kajian dari kinerja penerimaan 2017 menunjukkan kinerja rasio pajak Indonesia yang hanya 11,5%, angka ini merupakan yang paling rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara kepulauan kecil di kawasan pasifik misalnya Tokelau yang mencapai 14,2% atau Vanuatu yang mencapai 17,1%. Padahal, rata-rata OECD saat itu sebesar 34,2%. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia, menurut laporan itu adalah karena adanya penghindaran pajak (ekonomi.bisnis.com : 2019).

Fenomena berikutnya terjadi pada perusahaan yang terdaftar di BEI sektor pertambangan. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan sektor pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI telah dilaporkan oleh Global Witness melakukan praktik *tax avoidance* melalui aktivitas *transfer pricing*. PT. Adaro telah mengelola sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Yustinus seorang pengamat perpajakan menjelaskan, memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada merupakan salah satu upaya *tax avoidance*. PT. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu

baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Ini berarti penjualan dan keuntungan yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk dicantumkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di Negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US\$ 55 juta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia. Akibatnya, diperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahun. (finance.detik.com : tahun 2019).

Dilihat dari fenomena diatas dari sudut pandang kebijakan pajak, praktik penghindaran pajak berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang merugikan Negara dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara. Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya yaitu Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence*, dan Ukuran Perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu karakter eksekutif. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang

diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2018). Menurut Low (2018), dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya. Sedangkan Eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*.

Berdasarkan hasil penelitian dari M. Qyas Aulia Ryzki, Raida Fuadi (2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi risiko pada suatu perusahaan mencerminkan eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Mamlu Atul Munawaroh¹, Ramdany² (2019) menyatakan karakter eksekutif bukan faktor penentu potensi *tax avoidance*.

Variabel berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu komite audit. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen dalam pengawasan laporan keuangan serta jumlah komite audit

dalam pengawasan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak. Pada penelitian Cahyono dkk (2016) Sarra (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Kontra dengan penelitian Damayanti dkk (2015) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dimana komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan diketuai oleh komisaris independen. Komisaris independen tersebut merupakan anggota dari dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 4, perusahaan minimal mempunyai tiga anggota yang terdiri dari komisaris independen dan anggotanya berasal dari luar emiten.

Faktor selanjutnya adalah *Prudence*. *Prudence* terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran seperti tidak mengakui keuntungan sampai benar benar terjadi. *Prudence* suatu tindakan menurunkan laba dan *asset* bersih dalam menghadapi kabar buruk , tapi tidak menaikkan laba dan *asset* bersih dalam merespon kabar baik (Sundari, 2017). Hal inilah yang menyebabkan *prudence* yang diterapkan perusahaan dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan *Prudence* dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017), Kemala (2018), Septy (2019), Nursani (2020) menyimpulkan bahwa *Prudence* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin konservatif suatu laporan keuangan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Selanjutnya variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, sumber daya manusia dan jumlah penjualan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki *asset* yang besar. Dalam melakukan *tax avoidance* untuk upaya menekankan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh *asset* tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian Swingly dkk (2015) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* tetapi pada penelitian Wijayanti dkk (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Alasan peneliti meneliti tentang *Tax Avoidance* karena masih banyak terjadinya praktik penghindaran pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak Negara serta banyaknya perusahaan di sektor Pertambangan yang melakukan penghindaran pajak yang didukung dengan kasus yang terjadi. Peneliti tertarik meneliti di sektor pertambangan karena dibalik fantastisnya nilai ekonomi

yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusinya sangat minim dan juga perusahaan pertambangan perlu modal yang sangat banyak dan menggunakan *asset* dengan harga yang mahal sehingga banyak perusahaan di bidang pertambangan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Calvin Singly, I Made Sukartha (2015). Dimana terdapat perbedaan penelitian yaitu : Perbedaan variabel independen, penelitian ini menambahkan variabel *Prudence*.

Objek penelitian yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitian dari Calvin Singly, I Made Sukartha (2015) menggunakan sektor manufaktur sebagai objek penelitian. Tahun penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian ini periode yang digunakan yaitu dari tahun 2017-2021. Sedangkan penelitian Calvin Singly, I Made Sukartha (2015) periode yang digunakan yaitu dari tahun 2011-2013.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021 ?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021 ?
3. Apakah *Prudence* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021 ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021 ?
5. Apakah Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Prudence* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Simultan Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk meraih sarjana program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas pasir pengaraian. Dan penelitian ini sebagai alat penerapan teori dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait praktik-praktik Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan sehingga

kedepannya pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi Penghindaran Pajak.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature terkait masalah Penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

1.5 Keterbatasan Penelitian dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
3. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Calvin Singly, I Made Sukartha (2015). Dimana terdapat perbedaan penelitian yaitu : Perbedaan variabel independen, penelitian ini menambahkan variabel *Prudence*.

Objek penelitian yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitian dari Calvin Singly, I Made Sukartha (2015) menggunakan sektor manufaktur sebagai objek penelitian. Tahun penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian ini periode yang digunakan yaitu dari tahun 2017-2021. Sedangkan penelitian Calvin Singly, I Made Sukartha (2015) periode yang digunakan yaitu dari tahun 2011-2013.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang menyajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan

analisis terhadap permasalahan yang ada. Kemudian berisi kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang diperoleh dari variable-variabel penelitian serta dari penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang variabel penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta tahap pelaksanaan kegiatan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) menurut Anthony dan Govindarajaan (2011) adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* tersebut disebut hubungan agensi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai *principal* menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yaitu manajer sebagai *agent* untuk melaksanakan suatu jasa. Manajer laba dengan menggunakan total *asset* yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan untuk mendanai asset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan dalam meningkatkan intellectual (Rachmawati, 2012).

Agency Theory pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya konflik yang akan timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan yang telah listing di BEI. Konflik tersebut terjadi ketika pemilik utama perusahaan tersebut adalah fiskus (pemerintah) sekaligus pembuat regulasi dalam hal perpajakan sementara di sisi lain terdapat pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pihak fiskus yang merangkap sebagai pembuat regulasi berharap akan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak sementara manajemen terdapat pandangan bahwa perusahaan harus

menghasilkan laba yang signifikan dengan menghasilkan beban pajak yang rendah. Terdapat dua sudut pandang yang berbeda tersebut dapat menyebabkan adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan.

Permasalahan biaya pada teori agensi dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Disatu sisi manajer menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang sebesar-besarnya melalui peningkatan laba yang tinggi. Sedangkan disisi lain pemegang saham ingin menekan beban pajak melalui laba yang rendah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori agensi dimana para pemangku kepentingan seperti manajer dan pemilik usaha menginginkan laba yang besar maka perusahaan akan berusaha untuk membuat pelaporan keuangan dengan menunjukkan laba yang besar dengan memperkecil hutang atau beban pajaknya. *Principal* akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada *agent*. *Principal* memiliki harapan bahwa *agent* akan menghasilkan dari uang yang mereka investasikan.

Perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, dimana satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, dan sisi lainnya pemegang saham ingin menekankan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjebatani *agency problem* ini digunakan *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

Oleh karena itu peran karakter eksekutif dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak sangat penting, karena penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri.

2.1.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan laba dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan, dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2017). Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga 9 kegiatan ini memunculkan resiko yaitu buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Kurniasih, 2016).

Dalam Penelitian sundari, 2017, *Tax Avoidance* ini dihitung melalui ETR (*Effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nurfadilah, 2015). Semakin kecil nilai ETR, maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre - Tax Income}} \times 100 \%$$

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* menyebutkan tiga karakter dari *Tax Avoidance* (Hestanto, 2017) :

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih ada dalam batas toleransi dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan dengan melalui perencanaan perpajakan.

Sundari, dkk (2017) menjelaskan tujuan yang diharapkan dari penghindaran pajak adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, *efisien*, dan *efektif*.

Cara Melakukan Penghindaran Pajak Di penelitian Hoque, et al. (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Indikator *tax avoidance* menurut Nursani (2020) dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri adalah wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenai pajak. Seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut.

2. Pindah Lokasi

Wajib pajak melakukan pindah lokasi dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3. Penghindaran pajak secara yuridis

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

2.1.3 Karakter Eksekutif

Dalam menjalankan tugasnya, sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006 dalam Budiman, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk

melakukan pembiayaan dari hutang (Lewellen, 2003 dalam Budiman, 2012), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat. Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006 dalam Budiman, 2012). Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman, 2012). Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan keputusan yang yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.

Oleh Paligrova (2010) untuk mengukur variabel ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation,*) dibagi dengan total asset perusahaan. Adapun rumus deviasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$RISK = \sqrt{\sum_{T-1}^T \left(\frac{E - 1}{T \sum_{T-1}^T E} \right)^2} / (T - 1)$$

2.1.4 Komite Audit

Menurut Arents (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk

menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Pada umumnya, komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Sarraj, 2017) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit diukur dari jumlah komite audit, komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Di dalam penelitiannya komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam satu perusahaan. (Annisa dan Kurniawan, 2012).

$$KA = \frac{\text{Total Anggota Komite Audit Diluar Perusahaan}}{\text{Total Anggota Komite Audit}} \times 100 \%$$

2.1.5 Prudence

Prudence merupakan kofergensi dari konservatisme akuntansi. Menurut Belkai (2011) prinsip *Prudence* adalah: “Suatu prinsip yang mengimplikasikan

bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban yang sebaiknya dipilih untuk dilaporkan.

Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012) dengan adanya peraturan pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, perusahaan yang menerapkan *Prudence* akan mendapatkan keagresifitasan pajak yang rendah.

Belkai (2011) juga menganggap bahwa ketika memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu preferensi ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa *Prudence* merupakan prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. *Prudence* menyebabkan angka-angka tersaji dalam neraca ditetapkan lebih

rendah, aset bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih rendah, sebaliknya utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi. Sebagai konsekuensi penting dari perlakuan asimetrik konservatime atas keuntungan dan kerugian adalah understatement persisten dari nilai aset bersih dan laba dalam periode kini yang dapat mengarahkan pada *overstatement* terhadap laba periode berikutnya.

Penerapan *Prudence* dapat diketahui melalui pengukuran dengan cara mengurangi laba bersih dengan arus kas operasi Menurut Belkoui (2006):

$$Total\ Akruai = \frac{Laba\ Bersih + Depresiasi - Arus\ Kas\ Operasi}{Total\ Aset}$$

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Prasetyoni (2013:186) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain lain. Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi suatu perusahaan. Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar modal yang ditanam, sementara makin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran hutang dalam perusahaan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Dalam melakukan *tax avoidance* untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin,

yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logarithma dari total aset sebelum penyusunan revaluasi. Kemudian ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Ukuran\ Perusahaan = \log\ Total\ Aset\ Perusahaan$$

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

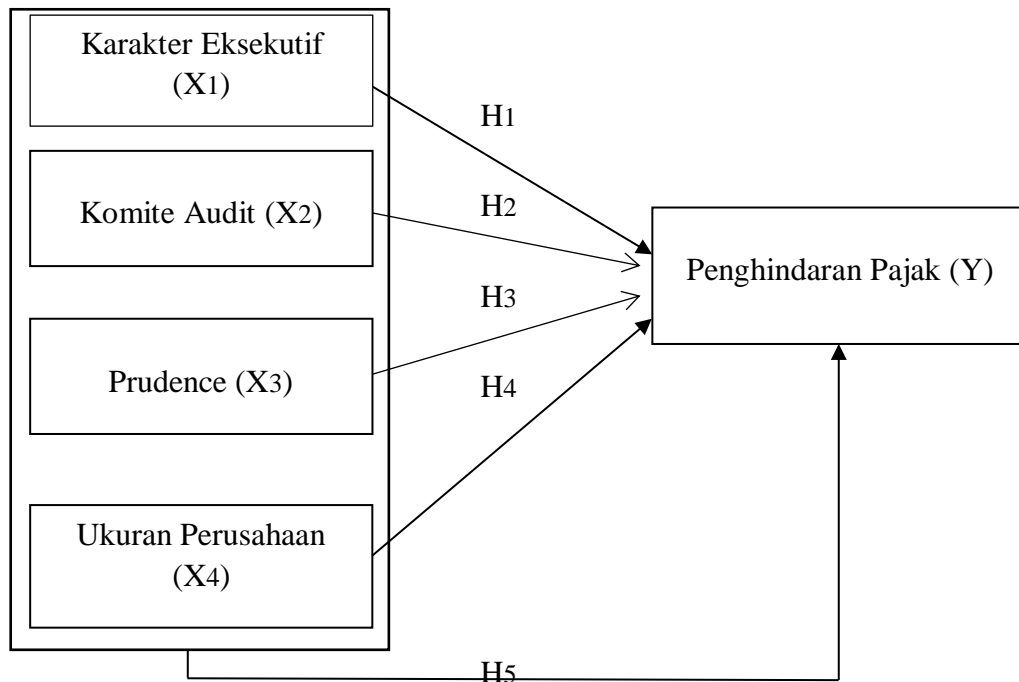
Hasil Penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1.	Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2013)	Calvin Swingly, I Made Sukartha (2015)	Hasil dari penelitian ini karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance sedangkan leverage berpengaruh negative komite audit dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
2.	Pengaruh konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada industry kimia dan logam di bursa efek	Hustna Dara Sarra (2017)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak sedangkan konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan negative dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

	Indonesia periode 2010-2014)		
3.	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Yoanis Carrica Wijayanti Ni dan Ketut Lely A.Merkusi wati (2017)	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
4	Pengaruh Profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiscal terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej tahun 2010-2013)	Rinaldi, Charoline Cheisviya nny (2015)	Hasil dari penelitian ini profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negative terhadap tax avoidance dan kompensasi rugi fiscal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
5	Pengaruh komite audit, leverage, Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	Dyah Ayu Wardani (2019)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan komite audit, leverage, return on asset, ukuran perusahaan, dan sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance.
6	Pengaruh Corporate Governance dan Prudence terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris pada Manufaktur di BEI periode 2014-2016)	Kemala Restu Dwinanda (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prudence, kepemilikan institusional dan kualitas audit memiliki pengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Karakter Eksekutif merupakan karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan. Karakter eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan pemimpin perusahaan itu sendiri. Pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* akan memiliki peluang melakukan penghindaran pajak. Karena semakin tinggi resiko yang diambil maka semakin besar keuntungan yang diperoleh.

Penelitian dari Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax*

Avoidance. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari I Made Aditya Nugrahitha dan Herkulanus Bambang Suprasto (2018) juga menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Diduga Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. No. 29/PM/2004 yang mengatakan komite audit yang ada dalam perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dan minimal satu orang yang berasal dari komisaris independen serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit maka dapat di ekspektasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Selanjutnya jika pengawasan berjalan efektif maka kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak di ekspektasikan menurun. Hal ini terkait dengan tugas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang ada di perusahaan.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Cahyono dkk (2016) Sarra (2017) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₂: Diduga Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

2.4.3 Pengaruh *Prudence* Terhadap *Tax Avoidance*.

Prudence menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode akuntansi yang diperbolehkan mengakui pendapatan selambat mungkin, pengakuan beban secepat mungkin, penilaian persediaan yang lebih rendah dan penilaian kewajiban yang lebih tinggi. Pemilihan metode akuntansi yang konservatif untuk menghindari pajak adalah dapat memperkecil besaran pajak terutang perusahaan, karena memilih kebijakan akuntansi yang konservatif akan menciptakan pengakuan beban lebih awal dan tidak langsung mengakui pendapatan (Jaya dkk (2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dkk (2015) menyatakan perusahaan dengan pajak semakin besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang konservatif untuk menekan beban pajak terutangnya melalui cara -cara yang diperbolehkan. Dengan semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang dibayarkan juga lebih rendah, karena laba perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017), Kemala (2018), Septy (2019), Nursani (2020) menyimpulkan bahwa *prudence* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Diduga *Prudence* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Hartono (2015) ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecilnya yang diukur berdasarkan total harta perusahaan atau aktiva. Kestabilan atau kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban perpajakannya. Berdasarkan teori agensi, *manager* memaksimalkan kinerjanya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan cara menekan beban pajak untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian dari Vani Mailia dan Apollo (2020) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dari hasil penelitian terdahulu maka ditarik hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄ :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

2.4.5 Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Pemilihan metode akuntansi yang konservatif untuk menghindari pajak adalah dapat memperkecil besaran pajak terutang perusahaan, karena memilih kebijakan akuntansi yang konservatif akan menciptakan pengakuan beban lebih awal dan tidak langsung mengakui pendapatan (Jaya dkk (2013)). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dkk (2015) menyatakan perusahaan dengan pajak semakin besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang konservatif untuk menekan beban pajak terutangnya melalui cara -cara yang diperbolehkan. Dengan semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang dibayarkan juga lebih rendah, karena laba perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak.

Dari keseluruhan variabel independen, masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dari kesimpulan tersebut, maka hipotesis kelima yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₅ : Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Prudence*, dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

BAB III METEDO PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021 dengan cara mengakses situs resmi (www.idx.co.id).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dan menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

Sumber data penelitian diperoleh dari laporan keuangan diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2017). Sumber data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan (annual report) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode penelitian tahun 2017-2021 (www.idx.co.id).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 yaitu sebanyak 43 perusahaan.

Tabel 3. 1
Populasi Perusahaan pertambangan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	ARII	Atlas Resources Tbk
3	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk
4	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
5	BUMI	Bumi Resources Tbk
6	BYAN	Bayan Resources Tbk
7	DEWA	Darma Henwa Tbk
8	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
9	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
10	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk
11	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
12	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk
13	HRUM	Harum Energy Tbk
14	INDY	Indika Energy Tbk
15	KKGI	Resources Alam Indonesi Tbk
16	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
17	MYOH	Samindo Resources Tbk
18	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk
19	PTBA	Bukit Asam Tbk
20	PTRO	Petrosea Tbk
21	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk
22	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
23	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk
24	BIPI	Astrindo Nusantra Infrastruktur Tbk
25	ELSA	Elnusa Tbk

26	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
27	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk
28	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
29	MITI	Mitra Investindo Tbk
30	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
31	SURE	Super Energy Tbk
32	ANTM	Aneka Tambang Tbk
33	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
34	DKFT	Central Omega Resources Tbk
35	INCO	Vale Indonesia Tbk
36	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk
37	SMRU	SMR Utama Tbk
38	TINS	Timah Tbk
39	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk
40	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk
41	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk
42	IFSH	Ifishdeco Tbk
43	MTFN	Kapitalinc Investment Tbk

Sumber. : www.idx.co.id

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2020). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020).

Dengan metode tersebut, sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang akan ditentukan. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021.

2. Perusahaan Pertambangan yang tidak listing di bursa efek 5 tahun berturut-turut mulai tahun 2017-2021.
3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian selama tahun 2017-2021.

Tabel 3. 2
Penentuan Jumlah Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	1	2		Ket
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	✓	✓	✓	1
2	ARII	Atlas Resources Tbk	✓	✗	✓	-
3	BOSS	Borneolah Sarana Sukses Tbk	✓	✓	✗	-
4	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	✓	✓	✓	2
5	BUMI	Bumi Resources Tbk	✓	✓	✓	3
6	BYAN	Bayan Resources Tbk	✓	✓	✓	4
7	DEWA	Darma Henwa Tbk	✓	✓	✓	5
8	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	✓	✗	✗	-
9	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	✓	✓	✗	-
10	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	✓	✗	✗	-
11	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	✓	✓	✓	6
12	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	✓	✗	✗	-
13	HRUM	Harum Energy Tbk	✓	✓	✓	7
14	INDY	Indika Energy Tbk	✓	✗	✗	-
15	KKGI	Resources Alam Indonesi Tbk	✓	✗	✗	-
16	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	✓	✓	✓	8
17	MYOH	Samindo Resources Tbk	✓	✓	✓	9
18	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	✓	✗	✗	-
19	PTBA	Bukit Asam Tbk	✓	✓	✗	-
20	PTRO	Petrosea Tbk	✓	✗	✗	-
21	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk	✓	✓	✗	-
22	TOBA	Toba Bara Sejahtra Tbk	✓	✓	✓	10
23	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk	✓	✗	✓	-
24	BIPI	AstriNusantraInfrastruktur Tbk	✓	✓	✗	-
25	ELSA	Elnusa Tbk	✓	✓	✓	11
26	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	✓	✓	✗	-
27	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	✓	✗	✓	-
28	MEDC	MedcoEnergiInternasional Tbk	✓	✓	✗	-
29	MITI	Mitra Investindo Tbk	✓	✗	✓	-
30	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	✓	✗	✓	-

31	SURE	Super Energy Tbk	✓	✗	✗	-
32	ANTM	Aneka Tambang Tbk	✓	✗	✓	-
33	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	✓	✗	✓	-
34	DKFT	Central Omega Resources Tbk	✓	✓	✗	-
35	INCO	Vale Indonesia Tbk	✓	✗	✓	-
36	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	✓	✓	✗	-
37	SMRU	SMR Utama Tbk	✓	✓	✗	-
38	TINS	Timah Tbk	✓	✗	✓	-
39	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	✓	✓	✗	-
40	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk	✓	✓	✗	-
41	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk	✓	✗	✓	-
42	IFSH	Ifishdeco Tbk	✓	✓	✗	-
43	MTFN	Kapitalinc Investment Tbk	✓	✓	✗	-

Sumber. : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat jumlah perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian berjumlah 11 perusahaan. Dengan tahun pengamatan 5 tahun berturut-turut, maka total sampel menjadi 11 perusahaan x 5 tahun adalah sebanyak 55. Sampel tersebut dipilih karena memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2020). Data sekunder meliputi laporan tahunan berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tahun 2017-2021. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs (www.idx.co.id) serta website perusahaan pertambangan.

3.4.2 Sumber Data

Data sekunder meliputi laporan tahunan 2017-2021. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs (www.idx.co.id) serta website perusahaan pertambangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen, dimana data diperoleh dari IDX (*Indonesia Stock Exchange*) Fact 2017-2021.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. Karakter Eksekutif (X₁)

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010). *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Oleh Paligrova (2010) untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax - Depreciation*) dibagi dengan total asset perusahaan. Adapun rumus deviasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$RISK = \sqrt{\sum_{T-1}^T \left(\frac{E - 1}{T \sum_{T-1}^T E} \right)^2} / (T - 1)$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*.

2. Komite Audit (X₂)

Komite audit diukur dari jumlah komite audit, komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga

anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Komite audit sekurang-kurang terdiri dari tiga anggota, Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam satu perusahaan. Menurut (Reviani dan Sudantoko, 2012) diukur dengan menggunakan rumus :

$$KA = \frac{\text{Total Anggota Komite Audit Diluar Perusahaan}}{\text{Total Anggota Komite Audit}} \times 100 \%$$

3. *Prudence* (X₃)

Prudence adalah suatu tindakan kehati-hatian dalam membuat perkiraan ketika terjadi ketidakpastian, sehingga asset atau pendapatan tidak dilebih lebihkan dan kewajiban atau biaya tidak dikurangi. (Sundari, 2017). Penerapan *Prudence* dapat diketahui melalui pengukuran dengan cara mengurangi laba bersih dengan arus kas operasi Menurut Belkoui (2006):

$$\text{Total Akrual} = \frac{\text{Laba Bersih} + \text{Depresiasi} - \text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

4. Ukuran Perusahaan (X₄)

Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang (Deddy, 2016). Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *natural*

logarithma dari total *asset* sebelum penyusunan revaluasi. Kemudian ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log Total Aset Perusahaan}$$

3.6.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah yang dipengaruhi variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan usaha mengurangi atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan tidak melanggar undang - undang yang ada.

Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan. Penggunaan ETR sebagai ukuran dalam mengukur *tax avoidance* telah efektif dipakai sebab ETR dapat memberikan deskripsi mengenai pengindaran pajak yang berasal dari perbedaan temporer serta dapat mendeskripsikan dinamika beban pajak karena dapat mewakili pajak kini dan tangguhan secara komprehensif (Hanlon & Heitzman, 2010).

Dalam Penelitian sundari, 2017, variabel ini dihitung melalui ETR (*Effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR digunakan karena dianggap dapat

merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nurfadilah, 2015). Semakin kecil nilai ETR, maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre - Tax Income}} \times 100 \%$$

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, dan teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan *software Eviews 10*.

Data panel atau *polling* adalah kombinasi dari data bertipe *cross-section* dan *time series*, yaitu sejumlah variable diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Ciri khusus pada data *time series* adalah berupa urutan *numeric* dimana interval antar observasi atau sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap, sedangkan data *cross section* adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi sejumlah variabel. Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i, i=1,2,\dots,N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \epsilon_i, i=1,2,\dots,T$$

dengan T merupakan banyaknya data *time series*. Sehingga persamaan data panel yang merupakan kombinasi dari persamaan *cross section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}, i=1,2,\dots,N; t=1,2,\dots,T$$

dimana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya data panel. Sehingga persamaan pada penelitian ini menjadi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1(it) + \beta_2 X_2(it) + \beta_3 X_3(it) + \beta_4 X_4(it) + \epsilon(it)$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Nilai konstanta (nilai Y bila X=0)

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ = *Koefisien Regresi*

X1 = Variabel Karakter Eksekutif

X2 = Variabel Komite Audit

X3 = Variabel Prudence

X4 = Variabel Ukuran Perusahaan

I = Perusahaan yang diobservasi (*cross section*)

t = Periode penelitian (*time series*)

ϵ = *Error term*

3.7.1 Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam penelitian (Ferdinand, 2014). Dalam analisis deskriptif, seorang peneliti akan menjelaskan obyek penelitian, memetakan responden berdasarkan karakteristik mereka, serta memetakan kecenderungan tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator variabel penelitian.

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum suatu data yang dilihat dari statistik-statistik seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Tujuan dari analisis statistik deskriptif berguna untuk mengetahui gambaran umum penyebaran data dalam penelitian dan deskripsi mengenai Karakter Eksekutif, komite audit (KA), *Prudence*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas residual yang banyak digunakan adalah uji Jarque-Bera (JB). Uji JB

dapat dilakukan dengan mudah dalam program Eviews yang langsung menghitung nilai JB statistic.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas akan dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika korelasi bivariat lebih besar dari 0,9 maka di dalam model terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2016).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)* atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Uji Heterosdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Tingkat signifikan yang digunakan adalah α 0,05 yang lazim digunakan dalam penelitian.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (DW). Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variable bebas (Ghozali, 2016).

Hipotesis yang akan diuji :

H₀: tidak ada autokorelasi

H_a: ada autokorelasi

1.8 Penentuan Model Estimasi

1.8.1 Model Pooled Least Square (Common Effect Model)

Common effect model (CEM) dikatakan sebagai model yang paling sederhana, dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel. *Common effect model (CEM)* dilakukan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross-section*. Penggabungan kedua jenis data tersebut dapat digunakan metode OLS biasa sehingga sering disebut dengan *Pooled Least Square* atau *common OLS* model untuk mengestimasi model data panel.

1.8.2 Model Efek Tetap atau *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan *common effect model (CEM)*. Penggunaan data panel *common effect model* tidak realistis karena akan menghasilkan *intercept* ataupun *slope* pada data panel yang tidak berubah baik antar individu (*cross-section*) maupun antar waktu (*time series*). Teknik ini dinamakan *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*. Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengkombinasikan efek waktu yang bersifat sistematik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel dummy waktu didalam model.

1.8.3 *Random Effect Model (REM)*

Random effect model (REM) adalah metode yang menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu/perusahaan. Dalam metode ini mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random/stokastik.

3.9 Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

3.9.1 *Uji Chow (Likelihood Ratio)*

Uji chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yakni metode *common effect model (CEM)* atau *fixed effect model (FEM)* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel.

Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model (CEM)*

H_a : *Fixed Effect Model (FEM)*

Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas F lebih dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect model (CEM)*. Sebaliknya, apabila probabilitas F kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect model (FEM)*.

3.9.2 Uji Hausman

Uji hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara *random effect model (REM)* dan *fixed effect model (FEM)* yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel.

Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model (REM)*

H_a : *Fixed Effect Model (FEM)*

Jika probabilitas chi-square lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah *fixed effect model (FEM)* dan sebaliknya.

3.9.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *random effect model* atau *common effect model (OLS)* yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *random effect model* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode

Breusch Pagan untuk uji signifikansi random effect model didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : *Common Effect Model (CEM)*

H_a : *Random Effect Model (REM)*

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nol, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah *random effect model (REM)* dari pada *common effect model (CEM)*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chisquares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah *common effect model (CEM)* bukan *random effect model (REM)*.

Uji LM tidak digunakan apabila pada *uji chow* dan *uji hausman* menunjukkan model yang paling tepat adalah *fixed effect model (FEM)*. *Uji LM* dipakai manakala pada *uji chow* menunjukkan model yang dipakai adalah *common effect model (CEM)*, sedangkan pada *uji hausman* menunjukkan model yang paling tepat adalah *random effect model (REM)*, maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan *common effect model (CEM)* atau *random effect model (REM)* yang paling tepat.

3.9.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dengan menggunakan Eviews. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dengan melihat probabilitas t hitung, ketika $\text{prob} \leq$ taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen Karakter Eksekutif, komite audit (KA), *Prudence* dan ukuran perusahaan (UP) secara bersamaan berpengaruh dengan variabel dependen *Tax avoidance*. Untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam model regresi digunakan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai $\text{prob F} \leq$ taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3. *R-Squared* (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi data panel, yaitu merupakan proporsi presentase sumbangan X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat menggunakan Eviews. Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana:

ESS: Jumlah kuadrat dari regresi

TSS: Total jumlah kuadrat

Besarnya nilai R^2 berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh antara variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya).